

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan

pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai kualitas yang bagus.

2. Penelitian ini masih terbatas pada kapasitas pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Di Kabupaten Batang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Armando, Gerry. (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Bukit tinggi)*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Annisa, Nur. (2017). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan*
- Arlia, Sari, Artana. (2016). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. 2017. *Akuntansi Sektor publik: Akunatansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Hanaffi, Ranny. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabubaten Pati, Surakarta*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Sistem Pengawasan*. Yogyakarta.
- Hasi, Yohanes (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Irfan, Haza. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang
- Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2001, Tentang *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Mahmudi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Pemeintah Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Pusat Pengembangan akuntansi dan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2003. *Bahan Ajar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Sekolah tinggi Akuntansi Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 51 Tahun 2010, *Tentang pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011*.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 171/PMK.05/2007, *Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.

Peraturan Pemerintah, Nomor 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah, Nomor 65 Tahun 2010, *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Presiden, Nomor 192 Tahun 2014, *Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Keuangan Pemerintah Daerah tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.